



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan suatu rencana untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menerbitkan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban dalam upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.

Maksud dari Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2018, sehingga laporan ini memuat penilaian pencapaian sasaran yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam Rencana Kierja dan Rencana Strategis SKPD.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya bersama mengembangkan dunia usaha Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyempurnaan LKj ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan pada Laporan Kinerja selanjutnya.

Jambi, Februari 2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Kedudukan dan Dasar Hukum	5
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategik	11
2.2 Perjanjian Kinerja	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
IV. PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

		Hal
Tabel 1.	Capaian Jumlah Reservat Tahun 2018	17
Tabel 2.	Capaian Jumlah benih ikan yang ditebar di perairan Tahun 2018	18
Tabel 3.	Capaian persentase tingkat kepatuhan tahun 2018	19
Tabel 4.	Capaian Jumlah rekomendasi dokumen perizinan Tahun 2018	19
Tabel 5.	Capaian Jumlah Produksi Perikanan tahun 2018	20
Tabel 6.	Capaian Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang berbadan hokum dan bersertifikasi tahun 2018	20
Tabel 7.	Capaian Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2018	21
Tabel 8.	Capaian Angka Konsumsi Ikan Perkapita pada Tahun 2018	21
Tabel 9.	Capaian Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2018	22
Tabel 10.	Capaian NTN dan NTPi tahun 2018	22
Tabel dan grafik 11.	Perkembangan jumlah reservat tahun 2013-2018	23
Tabel dan grafik 12.	Perkembangan jumlah benih ikan yang ditebar di perairan tahun 2013-2018	24
Tabel dan grafik 13.	Perkembangan jumlah rekomendasi perizinan tahun 2018	25
Tabel dan grafik 14.	Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2013-2018	25
Tabel dan grafik 15.	Perkembangan jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi tahun 2017-2018	27
Tabel dan grafik 16.	Perkembangan jumlah masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2014-2018	27
Tabel dan grafik 17.	Perkembangan angka NTN dan NTPi tahun 2013-2018	28
Tabel dan grafik 18.	Perkembangan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2013-2018	29
Tabel dan grafik 19.	Perkembangan angka konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/tahun) tahun 2013-2018	30
Tabel dan grafik 20.	Perkembangan jumlah persentase tingkat kepatuhan tahun 2017-2018	31
Tabel 21.	Realisasi Keuangan berdasarkan program tahun	34

Tabel 22. anggaran 2018
Alokasi dan realisasi anggaran bersumber APBN 40
tahun 2018

Ikhtisar Eksekutif

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2018 adalah sebagai pertanggung-jawaban kinerja Dinas selama tahun 2018, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jambi, bidang kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah tugas desentralisasi dan dekonsentrasi bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada Rencana Kinerja Tahun 2018, selama periode ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menetapkan 7 tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang diwujudkan menjadi 11 sasaran strategik. Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategik tersebut diimplementasikan melalui 9 program dan 63 kegiatan termasuk rutin. Pada awal penyusunan Anggaran biaya untuk mengimplementasikan 9 program tersebut sebesar Rp. 24.540.433.000,- yang terdiri dari dana APBD Murni dan dana DAK sebesar Rp. 22.445.919.000 serta ditunjang oleh Dana

Hasil capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memenuhi seluruh sasaran target dari 11 sasaran yang ditargetkan.

APBN (Dekonsentrasi) sebesar Rp. 2.094.514.000,- yang terdiri dari 5 satuan kerja (satker). Pada saat berjalannya tahun anggaran, terjadi rasionalisasi anggaran APBD melalui mekanisme APBD Perubahan sebesar Rp.439.280.000,- Total anggaran pada akhir tahun setelah dikurangi rasionalisasi sebesar Rp.24.101.153.000,-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama tahun 2018 telah memenuhi 11 sasaran Strategik dari 8 sasaran strategik yang ditargetkan. Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terwujudnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan fungsinya, meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan meningkatkan daya saing produk hasil perikanan, serta meningkatkan konsumsi ikan perkapita, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

Dari indikator kinerja utama SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018, menunjukkan bahwa capaian pada IKU telah mendekati target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKU sebagai berikut :

- a. Jumlah reservat dengan capaian kinerja sebesar 104 %.
- b. Jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan dengan capaian kinerja sebesar 81,5 %.
- c. Jumlah rekomendasi dokumen perizinan dengan capain kinerja sebesar 50 %
- d. Produksi perikanan dengan capaian kinerja sebesar 83,3 %
- e. Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi dengan capaian sebesar 115 %.
- f. Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- g. NTN dengan capaian kinerja sebesar 102,8 %
- h. NTPi dengan capaian kinerja sebesar 96,1 %

- i. Jumlah sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan capaian kinerja sebesar 120 %
- j. Peningkatan Angka Konsumsi ikan perkapita dengan capaian kinerja sebesar 105 %
- k. Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 97,1 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2018 dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terutama dengan dinas yang membidangi perikanan ditingkat Kabupaten/Kota dalam upaya penyesuaian program kegiatan guna tercapainya sasaran kelautan dan perikanan yang sudah ditetapkan .
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Menciptakan inovasi di bidang kelautan dan perikanan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan pakan ikan serta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
2. Mendorong SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan dan Dasar Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebelumnya bernama Dinas Perikanan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 1996 tanggal 18 Nopember 1996 tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan Provinsi Jambi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 51 Tahun 2016 adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- e. Perumusan Kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam sektor perikanan dan kelautan adalah:

1. Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Sub Urusan Perikanan Tangkap, yaitu:
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;
 - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Sub Urusan Perikanan Budidaya, yaitu:

Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
4. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran, yaitu:

Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan

3 orang Kepala Bidang dan 3 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Program,Kepegawaian dan pelaporan
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset
- b. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - Seksi perbenihan dan produksi
 - Seksi Kesehatan ikan, lingkungan dan kawasan perikanan budidaya
 - Seksi Pakan dan teknologi perikanan budidaya
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
 - Seksi Kenelayanan dan usaha perikanan tangkap
 - Seksi Konservasi dan sumberdaya ikan
 - Seksi Kepelabuhanan dan pengelolaan ruang laut
- d. Bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk, membawahi:
 - Seksi Pengawasan
 - Seksi Pengolahan dan bina mutu
 - Seksi pemasaran, promosi dan investasi
- e. UPTD BBID (Balai Benih Ikan Daerah)
 - Subbag TU
- f. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai, membawahi :
 - Subbag Tata usaha
- g. UPTD BBIS (Balai Benih Ikan Sentral Kerinci)
 - Subbag TU

Pada awal tahun 2018, untuk menjalankan amanat UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana adanya pembagian kewenangan bidang kelautan dan perikanan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, maka terjadi perubahan struktur organisasi di dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan peraturan gubernur

No. 20 tahun 2018 dan peraturan gubernur No.21 tahun 2018, eselon III UPTD BBID dan UPTD BBIS dihapuskan pada struktur organisasi dinas dan membentuk UPTD baru yakni UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) yang terdiri dari 3 eselon IV yakni subbag TU UPTD PMHP, Seksi penerapan mutu dan seksi pelayanan dan pengujian mutu. Pada tingkat eselon IV UPTD Pelabuhan perikanan Pantai, membentuk 2 seksi baru yaitu Seksi Kesyahbandaran dan seksi pelayanan usaha perikanan.

Untuk lebih detailnya mengenai Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada lampiran 7.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai SDM sebanyak 327 orang pegawai yang terdiri atas :

1. Pejabat Struktural 18 orang
2. Pelaksana (Staf) 149 orang
3. Tenaga Honorer Kontrak 150 orang

a. Berdasarkan golongan

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, memiliki pegawai berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Golongan IV b : 10 orang
- 2) Golongan IV a : 7 orang
- 3) Golongan III d : 27 orang
- 4) Golongan III c : 32 orang
- 5) Golongan III b : 27 orang
- 6) Golongan III a : 32 orang
- 7) Golongan II d : 4 orang
- 8) Golongan II c : 11 orang
- 9) Golongan II b : 11 orang
- 10) Golongan II a : 13 orang
- 11) Golongan I d : - orang
- 12) Golongan I c : 1 orang
- 13) Golongan I b : 2 orang
- 14) Golongan I a : - orang

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, memiliki pegawai berdasarkan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1) Pascasarjana (S2) | : 11 orang |
| 2) Sarjana (S1) | : 107 orang |
| 3) Diploma III | : 9 orang |
| 4) Diploma I | : - orang |
| 5) SLTA sederajat | : 37 orang |
| 6) SLTP sederajat | : 1 orang |
| 7) SD | : 2 orang |

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategik

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Perencanaan strategik yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan potensi lahan dan kondisi yang dimiliki saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang maka rumusan tujuan, sasaran dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi serta permasalahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan fungsinya
3. Meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan.
6. Meningkatkan konsumsi ikan perkapita
7. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

Tujuan–tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dengan program-program yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kawasan yang terlindungi • Meningkatnya populasi ikan lokal jambi 	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir
Tujuan 2: Terwujudnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan fungsinya	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan 	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Tujuan 3: Meningkatkan produksi perikanan	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan • Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha perikanan 	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program pengembangan perikanan budidaya

Tujuan 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan pesisir	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas akses lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir • Meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program pengembangan perikanan budidaya

Tujuan 5: Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan	
Sasaran	Program
Meningkatnya mutu produk hasil perikanan	Program Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tujuan 6: Meningkatkan konsumsi ikan perkapita	
Sasaran	Program
Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	Program Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tujuan 7: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	
Sasaran	Program
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir

B. Sasaran

1. Meningkatnya kawasan yang terlindungi.
2. Meningkatnya populasi ikan lokal jambi.

3. Meningkatnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Meningkatnya produksi perikanan .
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha perikanan.
6. Memperluas akses lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
7. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.
8. Meningkatnya mutu produk hasil perikanan.
9. Meningkatnya konsumsi ikan per kapita
10. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

C. Program Kerja

Memasuki tahun kedua Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, program kerja Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2018 mengacu kepada Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yang telah direvisi pada tahun 2018, dengan menggariskan beberapa Program dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi :

1. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Program pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

Uraian lengkap Perjanjian kinerja Tahun 2018, dapat dilihat pada Matriks Renstra (Lampiran 1), Indikator Kinerja Utama (IKU) (Lampiran 2), Matriks Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018 (Lampiran 3), Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Lampiran 4), Matriks Perjanjian Kinerja

2018 (Lampiran 5), Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2018 (Lampiran 6), Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2019 (Lampiran 7), Pernyataan Perjanjian Kinerja 2019 (Lampiran 8), Matriks Perjanjian Kinerja 2019 (Lampiran 9), Strukstur Organisasi (Lampiran 10), Penghargaan Tahun 2018 (Lampiran 11).

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan Kinerja sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut disepakati sebagaimana diuraikan berikut.

1. Meningkatnya kawasan yang terlindungi, dengan indikator sasaran peningkatan Jumlah reservat
2. Meningkatnya populasi ikan lokal jambi, dengan indikator sasaran jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan
3. Meningkatnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan berlaku, dengan indikator sasaran jumlah rekomendasi dokumen perizinan yang diterbitkan.
4. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran Jumlah produksi perikanan
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha perikanan, dengan indikator sasaran Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi
6. Memperluas akses lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir dengan indikator sasaran Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih.
7. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan dengan indikatoir sasaran yaitu NTN dan NTPi.
8. Meningkatnya mutu produk hasil perikanan dengan indikator sasaran yaitu jumlah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang dimiliki oleh produk olahan.

9. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita dengan indikator sasaran angka konsumsi ikan perkapita
10. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku dengan indikator sasaran yaitu persentase tingkat kepatuhan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2018, capaian kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RENSTRA 2018 adalah sebagai berikut :

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1). Indikator kinerja Jumlah reservat

Capaian jumlah reservat tahun 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1. berikut :

Tabel 1. Capaian jumlah reservat tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Jumlah reservat (lokasi)	24	23	95,8%

*realisasi sementara

Dari tabel 2 terlihat capaian kinerja pada indikator kinerja jumlah reservat pada tahun 2018 mencapai persentase 95,8 % dimana terealisasi 24 lokasi dari 24 lokasi yang ditargetkan. Peningkatan jumlah reservat didukung oleh kegiatan Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui

pembinaan kepada masyarakat disekitar reservat dan POKMASWAS yang ada sehingga lubang larangan dan suaka perikanan yang ada bisa meningkat status nya menjadi sebuah reservat. Pembangunan pondok jaga dikawasan suaka dan lubang larangan juga dilakukan agar sumberdaya perikanan yang ada tetap dapat terjaga.

2). Indikator jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan

Capaian jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan tahun 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2. berikut :

Tabel 2. Capaian jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan (ekor)	270.000	220.000	81,5

*Realisasi sementara

Dari tabel 2 terlihat indikator benih ikan lokal yang ditebar diperairan pada tahun 2018 memenuhi 81,5 % dari apa yang telah ditargetkan. Realisasi penebaran ikan lokal telah dilakukan secara maksimal. Capaian yang belum mencapai 100 % dikarenakan keterbatasan anggaran pada APBD sehingga alokasi anggaran untuk benih ikan lokal yang ditebar hanya cukup untuk 220.000 ekor benih. Pencapaian indikator ini juga didukung oleh kegiatan pengelolaan instalasi thekok dan instalasi pendung semurup kerinci sebagai instalasi untuk memproduksi benih ikan lokal jambi seperti ikan semah, betok, jelawat dan lain-lain. Dengan adanya kedua instalasi ini diharapkan ketersediaan benih ikan lokal untuk ditebar diperairan dapat terpenuhi.

3). Indikator persentase tingkat kepatuhan

Capaian persentase tingkat kepatuhan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian persentase tingkat kepatuhan tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Persentase tingkat kepatuhan (%)	70	68	97,1

*Realisasi sementara

Dari tabel 3 tersebut terlihat untuk indikator persentase tingkat kepatuhan tahun 2018 hampir memenuhi target yang ditetapkan yakni 97,1 %. Pencapaian indikator sasaran ini didukung oleh kegiatan pengawasan terpadu kelautan dan perikanan. melalui kegiatan ini, dilakukan pengawasan terhadap nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan yang mentaati peraturan yang berlaku. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan terpadu ini menjadi salah satu faktor menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat sulit untuk mencapai 100 %.

4). Indikator Jumlah rekomendasi dokumen perizinan

Capaian jumlah rekomendasi dokumen perizinan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Capaian jumlah rekomendasi dokumen perizinan tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Rekomendasi dokumen perizinan	2	1	50

*Realisasi sementara

Dari tabel 4 diatas terlihat capaian jumlah rekomendasi dokumen perizinan sebesar 50 %. Hal ini disebabkan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang merupakan dasar dan pedoman dalam tata ruang serta perizinan kelautan dan perikanan Provinsi Jambi baru selesai pada akhir tahun 2018, akan tetapi belum ditetapkan menjadi PERDA. Oleh karena itu dokumen perizinan yang terkait pemanfaatan kelautan dan perikanan belum bisa diterbitkan.

5). Indikator produksi perikanan

Capaian jumlah produksi perikanan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Capaian jumlah produksi perikanan tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1. Produksi Perikanan budidaya (ton)	60.674	50.271,5	82,9
2. Produksi Perikanan tangkap (ton)	63.010	52.697	83,6
Total Produksi Perikanan (Ton)	123.684	102.968,5	83,3

*Realisasi sementara

Dari tabel 5 terlihat Indikator produksi perikanan dari target sebesar 123.684 ton terealisasi sebesar 102.968,5 ton atau 83,3 %. Pencapaian indikator ini didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap dan pengembangan perikanan budidaya perikanan.

6). Indikator Jumlah Kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi

Capaian jumlah Kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Capaian jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi	62	71	115

*Realisasi sementara

Dari tabel 6, terlihat capaian indikator ini mencapai 115 % atau melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 62 unit. Pencapaian indikator ini didukung oleh program pengembangan perikanan budidaya dan pengembangan perikanan tangkap.

Peningkatan jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi merupakan fokus dari kedua program tersebut. Hal ini dikarenakan pembinaan kelompok usaha perikanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi menurut UU. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

7). Indikator Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Capaian jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Capaian jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	20	24	120

*Realisasi sementara

Dari tabel 8 terlihat capaian indikator jumlah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 120 %. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, peningkatan jumlah SKP ini merupakan kegiatan utama pada dinas kelautan dan perikanan provinsi jambi karena merupakan kewenangan provinsi menurut UU. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya pembentukan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) dapat menunjang pencapaian indikator ini.

8). Indikator Angka Konsumsi Ikan Perkapita

Capaian Angka Konsumsi Ikan perkapita pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel Capaian Angka Konsumsi Ikan Perkapita pada Tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Konsumsi Ikan perkapita (Kg/kapita/tahun)	36,00	37,80	105

*Realisasi sementara

Dari tabel 8 terlihat untuk indikator Angka Konsumsi Ikan Perkapita pada tahun 2018 juga melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 37,80 atau sebesar 105 %. Pencapaian indikator ini dicapai melalui program pengembangan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan promosi dan publikasi kelautan dan perikanan, pengembangan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

9). Indikator Jumlah Masyarakat pesisir yang dilatih

Capaian jumlah Masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Capaian jumlah masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Jumlah Masyarakat Pesisir yang dilatih	100	100	100

*Realisasi sementara

Dari tabel 9 terlihat Indikator masyarakat pesisir yang dilatih pada tahun 2018 terealisasi 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 100 orang. Upaya untuk mencapai indikator sasaran ini lakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan di desa-desa pesisir provinsi jambi.

10). Indikator NTN dan NTPi

Capaian NTN dan NTPi provinsi jambi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Capaian NTN dan NTPi tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1. NTN	110,32	113,37	102,8
2. NTPi	100,00	96,13	96,1

*Realisasi sementara

Dari tabel 10 terlihat Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukat Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2018 terealisasi 102,8 % dan 96,1% dari target yang ditetapkan. Upaya untuk mencapai indikator sasaran ini lakukan melalui keempat program teknis Dinas Kelautan Perikanan, khususnya program perikanan tangkap dan program perikanan budidaya.

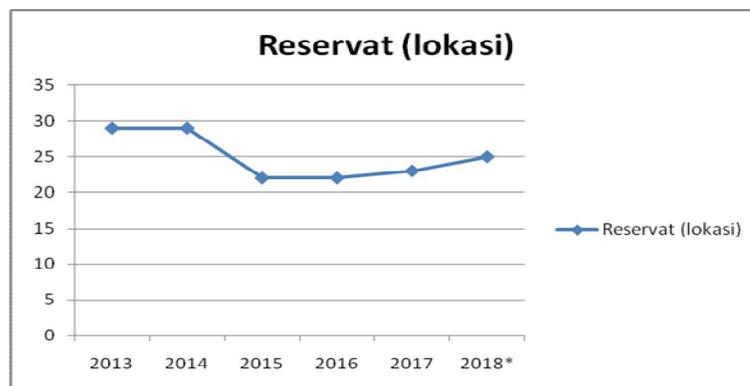
B. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

1). Indikator Jumlah reservat

Jumlah reservat tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 11. Perkembangan Jumlah reservat tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	
Reservat (lokasi)	29	29	22	22	22	23	(2,9)



Dari tabel dan grafik 11 terlihat jumlah reservat pada tahun 2015 menurun drastis, hal ini disebabkan banyaknya reservat yang sudah tidak layak lagi diakibatkan aktivitas PETI. Namun jumlah reservat terus dikembangkan hingga di tahun 2018 ada penambahan 1 reservat baru di Kabupaten Bungo.

2). Indikator Jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan

Jumlah Benih ikan lokal yang ditebar diperairan tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 12. Perkembangan Jumlah benih ikan yang ditebar diperairan tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Jumlah benih ikan yang ditebar (ekor)	625.000	600.000	545.000	1.005.000	350.000	220.000	(6,2)



Dari tabel dan grafik 12 terlihat jumlah restocking ikan diperairan umum pada tahun 2014 restocking ikan sebanyak 600.000 ekor dan pada tahun 2015 sebanyak 545.000 ekor. Pada tahun 2016, jumlah restocking meningkat tajam sebanyak 1.005.000 ekor. Pada tahun 2018 jumlah restocking menurun hanya sebanyak 220.000 ekor. Jumlah restocking ikan ini berfluktuasi, hal ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Lokasi restocking ini tersebar di semua suaka dan lubang larangan yang ada di Provinsi Jambi.

3). Indikator jumlah rekomendasi dokumen perizinan

Jumlah kawasan minapolitan tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 13. Perkembangan Jumlah rekomendasi perizinan Tahun 2018

Indikator	Capaian				Perkembangan (%)
	2015	2016	2017	2018	
Rekomendasi dokumen perizinan (Kwsn)	-	-	-	1	

*Realisasi sementara

Dalam upaya menjaga kedaulatan laut dan pengelolaan ruang laut di Provinsi Jambi, di Tahun 2018 menargetkan 2 dokumen perizinan dan hanya mampu merealisasikan 1 dokumen berupa dokumen Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

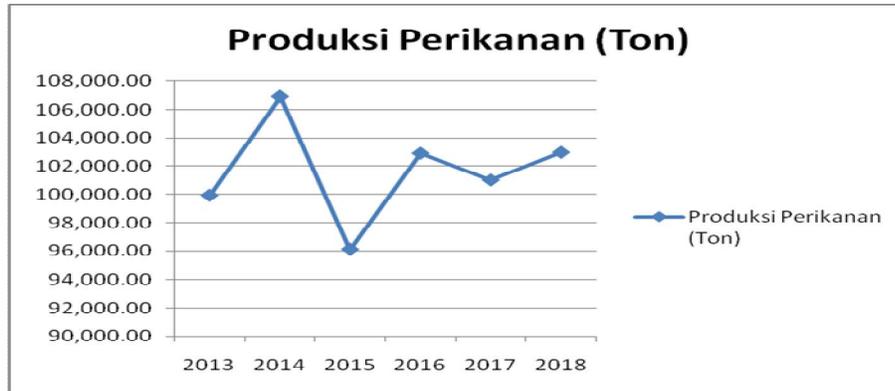
4). Indikator Produksi Perikanan

Capaian Produksi tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 14. Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	
Produksi Perikanan (ton)	99,913.50	106,881.90	96,087.30	102.904,6	100.998,2	102.968,5	0,8

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik 14 terlihat produksi perikanan pada tahun 2013 sebesar 99.913,5 ton pertahun, angka ini terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi 106,881.90 ton namun di tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 96,087.30 akan tetapi produksi kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 102.904,6 ton. Akan tetapi pada tahun 2017 Produksi perikanan turun menjadi 100.998,2 Ton. Pada tahun 2018 produksi perikanan kembali meningkat menjadi 102.968,5 ton. Turunnya produksi perikanan di tahun 2015 ini sebagai dampak kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi. Peningkatan produksi perikanan pada tahun 2018 seiring dengan mulai intensifnya usaha budidaya ikan dan usaha penangkapan ikan.

5). Indikator Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi

Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 15. Perkembangan Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi tahun 2017 – 2018

Indikator	Capaian		Perkembangan (%)
	2017	2018*	
Kelompok usaha perikanan berbadan hukum dan bersertifikasi	114	71	(38)

*Realisasi sementara

Seiring dengan diharuskannya calon penerima bantuan untuk memiliki badan hukum dan bersertifikasi dan banyaknya usulan dari pembudidaya, di tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merealisasikan 114 sertifikasi, namun jumlah sertifikasi yang dilakukan di tahun 2018 menurun menjadi 47 sertifikasi yang dilakukan melalui program perikanan budidaya. Menurunnya jumlah sertifikasi yang dilakukan ini seiring dengan penurunan anggaran yang sangat signifikan pada program perikanan budidaya. Akan tetapi di tahun 2018 melalui program perikanan tangkap telah berhasil merealisasikan 24 KUB menjadi berbadan hukum yang pada tahun sebelumnya belum ada KUB yang berbadan hukum.

6). Indikator Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih

Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 16. Perkembangan Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih tahun 2014 – 2018

Indikator	capaian					Perkembangan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018*	
Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih	160	200	120	516	100	58,6

*Realisasi sementara

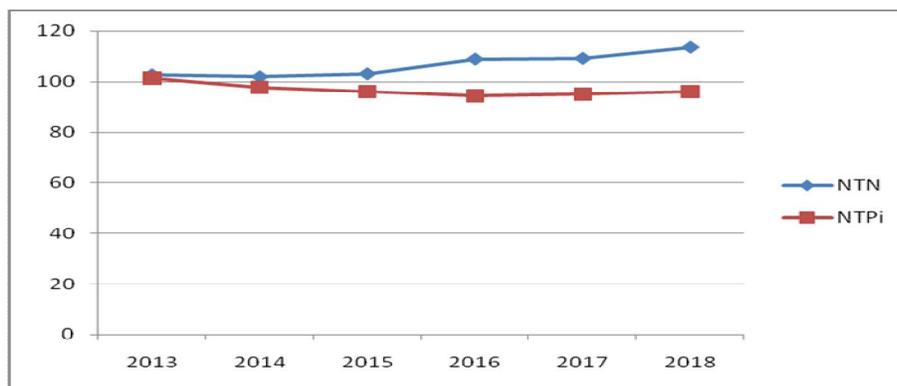


7). Indikator NTN dan NTPi

Angka NTN dan NTPi Provinsi Jambi tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 17. Perkembangan angka NTN dan NTPi tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
NTN	102,66	101,9	103,03	108,76	109,04	113,37	2,0
NTPi	101,32	97,77	96,08	94,39	95,1	96,13	(1,0)



Dari tabel dan grafik 17 terlihat NTN (Nilai Tukar Nelayan) dan NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan) sangat fluktuasi. NTN memiliki trend

yang positif dengan persentase perkembangan selama 6 tahun sebesar 2 %, sedangkan NTPi cenderung mengalami penurunan sebesar 1%.

8). Indikator Jumlah Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)

Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 18. Perkembangan Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian					Perkembangan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018*	
Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	-	-	5	17	24	141



Dari tabel dan grafik 18 terlihat trend jumlah SKP sangat positif, hal ini diharapkan semakin banyaknya produk yang memiliki SKP sehingga meningkatkan daya saing produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

9). Indikator Jumlah Angka konsumsi ikan perkapita

Capaian konsumsi ikan perkapita tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 19. Perkembangan angka konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2013 – 2018

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	32.76	34.0	34.7	35,0	37,0	37,8	2,9

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik 19 terlihat pada tahun 2013 menunjukkan angka 32,76 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2018 angka konsumsi ikan perkapita masyarakat Provinsi Jambi mencapai 37,80 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan sebesar 2,11%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, dan lain sebagainya.

10). Indikator Persentase tingkat kepatuhan

Jumlah Persentase tingkat kepatuhan tahun 2013 - 2018 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik 20. Perkembangan Jumlah Persentase tingkat kepatuhan tahun 2017 – 2018

Indikator	Capaian		Perkembangan (%)
	2017	2018	
Peresentase tingkat kepatuhan (%)	65	68	4,6

*Realisasi sementara

Berdasarkan tabel 20 terlihat tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan meningkat sebanyak 4,6 %. Usaha peningkatan persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha perikanan melalui keempat program teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi khususnya pada kegiatan pengawasan.

C. Hambatan dan kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam tahun 2018 antara lain masih terbatasnya sumberdaya manusia yang menangani bidang perikanan sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan belum maksimal.

D. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2018 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah, karena :
 - a. Terbatasnya kemampuan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi.
 - b. Masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya.

- c. Masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Belum adanya formasi jabatan fungsional di sektor perikanan untuk Balai Benih Ikan, baik di BBIS maupun BBI lokal.
6. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
7. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
8. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta)
9. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
10. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi sumberdaya ikan.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran dibidang

penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

E. Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Melakukan rekrutmen tenaga teknis/sarjana kelautan dan perikanan, khususnya untuk tenaga di lapangan serta untuk tenaga pendamping paket yang diberikan langsung kepada nelayan atau pembudidaya ikan.
4. Melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar.
5. Mengembangkan pola pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan DAK.
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/ pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

F. Realisasi Penyerapan Anggaran

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tersebut diatas, tergambar dalam penyerapan APBD pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar : Rp. 22.445.919.000,- yang terdiri dari 18.650.000.000,- APBD Murni dan Rp. 3.795.919.000 Dana DAK dan terjadi pengurangan sebesar Rp. 439.280.000,- pada APBD Perubahan, sehingga jumlah total anggaran pada tahun 2018 yakni Rp. 22.006.639.000,- yang terdiri dari 9 Program dengan realisasi keuangan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 20.347.634.012,- dengan persentase 92,46 % (keuangan) dan 95,85 % (fisik). Secara rinci realisasi keuangan APBD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi keuangan berdasarkan program tahun anggaran 2018

PROGRAM		Anggaran	REALISASI		
			KEU	%	FISIK (%)
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.562.984.800	1.361.997.724	87,14	99,84
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	2.500.000	50	50
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	580.250.000	421.846.362	72,70	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	400.499.800	400.899.800	100	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000	40.000.000	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.983.500	99,97	100
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	40.000.000	39.999.000	99,99	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12.235.000	12.135.000	99,18	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	15.000.000	15.000.000	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	23.222.500	38,70	100
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000	34.681.1562	99,09	100

II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.105.800.000	1.033.826.103	93,49	97,98
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	65.500.000	65.500.000	100	100
11	Pengadaan Mebeleur	40.000.000	40.000.000	100	100
12	Pengadaan computer	93.300.000	89.657.100	96,10	100
13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	150.000.000	149.705.000	99,80	100
14	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	600.000.000	555.509.503	92,58	100
15	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	100.000.000	76.564.500	76,56	77,61
16	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	57.000.000	56.890.000	99,81	100
III	Program peningkatan disiplin aparatur	195.000.000	186.164.600	95,47	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	195.000.000	186.164.600	95,47	100
IV	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	386.568.000	261.847.460	67,74	69,11
1	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000	30.581.000	20,39	20,39
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	52.648.000	49.648.000	94,30	100
3	Penatausahaan kepegawaian	144.709.000	143.922.140	99,46	100
4	Penatausahaan kearsipan	39.211.000	37.696.200	96,14	100
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.245.579.300	1.197.618.959	96,15	97,74
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	241.900.200	217.777.200	90,03	91,25
	Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik	465.141.400	456.938.130	98,24	100
	Rancangan penyusunan program, anggaran dan sinkronisasi program kegiatan SKPD	255.957.100	253.459.000	99,02	100
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	127.496.600	114.819.437	90,06	94,51
	Inventarisasi dan penertiban aset	155.084.000	154.625.192	99,70	100

VI	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	6.651.324.520	5.797.269.152	87,16	91,53
	Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya daya kelautan dan perikanan	1.670.305.050	1.648.005.300	98,66	99,97
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1.365.588.000	1.223.991.800	89,63	100
	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	1.285.777.550	1.184.856.700	92,15	97,28
	Pengelolaan ruang laut	1.710.388.000	1.139.702.440	66,63	69,13
	Pengelolaan instalasi thehok	161.488.520	148.728.400	92,10	100
	Pengelolaan instalasi pendung semurup	457.777.400	451.984.512	98,73	100
VII	Program pengembangan budidaya perikanan	3.581.032.080	3.487.314.410	97,38	98,58
	Pengembangan budidaya ikan disentra produksi	187.110.000	186.960.200	99,92	100
	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan budidaya	186.384.000	180.294.000	96,73	100
	Pengembangan perbenihan ikan komersil dan ikan lokal jambi di UPTD BBID	435.312.500	431.356.350	99,09	100
	Pengembangan ikan hias UPTD BBID	94.776.980	94.353.980	99,55	100
	Pengembangan benih dan induk di UPTD BBIS Kerinci	1.510.418.600	1.504.650.490	99,62	100
	Pengembangan ikan semah	87.852.000	87.852.000	100	100
	Pengembangan dan pelatihan pemberdayaan wanita pembudidaya ikan dan pemuda kreatif	49.916.000	49.916.000	100	100
	Pengembangan dan pelatihan perikanan budidaya di pondok pesantren, LP, sekolah dan TNI/Polri	47.784.000	46.958.800	98,27	100
	Pemberdayaan pembudidaya di kawasan mandiri pangan	52.576.000	52.573.000	99,99	100
	Kesehatan ikan dan lingkungan	202.088.000	187.840.500	92,95	93,69
	Pengembangan kawasan perikanan budidaya	80.934.000	78.965.600	97,57	100
	Pengembangan dan penguatan modal usaha perikanan budidaya	105.534.000	100.729.300	95,45	100

	Pengembangan mutu pakan	266.732.000	218.841.840	82,05	85,75
	Pengembangan teknologi perikanan budidaya	273.584.000	266.022.350	97,24	100
VIII	Program pengembangan perikanan tangkap	4.578.392.100	4.415.175.394	96,44	97,98
	Pengelolaan dan pengembangan aktifitas UPTD PPP	1.326.267.500	1.312.446.895	98,96	100
	Pengembangan sarana perikanan tangkap	1.922.976.000	1.863.261.360	96,89	97,48
	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	262.328.000	258.202.339	98,43	100
	Pengelolaan sumberdaya ikan	522.586.600	517.351.900	99	100
	Pengembangan kawasan perikanan tangkap	105.466.000	72.219.500	68,48	72,27
	Kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan	236.584.000	192.124.700	81,21	93,66
	Pengembangan dan pemberdayaan nelayan	202.184.000	199.568.700	98,71	100
9	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	2.699.958.200	2.606.420.210	96,54	98,77
	Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan	1.050.983.500	1.026.450.440	97,67	98,68
	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	149.184.000	139.664.583	93,62	100
	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	470.075.000	446.658.547	95,02	97,38
	Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil Perikanan (LPPMHP)	16.311.000	16.311.000	100	100
	Peningkatan mutu produk hasil kelautan dan perikanan	222.611.500	201.771.881	90,64	96,83
	Pengembangan usaha dan investasi pengolahan hasil perikanan	129.234.000	124.958.200	96,69	100
	Pengelolaan instalasi ikan hias taman anggrek	198.769.200	193.527.500	97,36	100
	Pengembangan UPTD Penerapan mutu Hasil perikanan (PMHP)	462.790.000	457.078.059	98,77	100
	JUMLAH	22.006.639.000	20.347.634.012	92,46	95,85

Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Program dalam Bidang Sekretariat**

Secara garis besar tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dari 5 Program yang dimiliki dalam bidang sekretariat, baik itu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Permasalahan dalam penyerapan anggaran terdapat pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini terkendala pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang hanya menyerap 20,39 % anggaran. Kegiatan ini tidak diserap optimal dikarenakan kegiatan pendidikan dan pelatihan PPNS tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada nya pelatihan yang diadakan oleh kementerian Kelautan dan perikanan RI sehingga anggaran yang ada tidak bisa diserap.

➤ **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan. Solusinya yakni perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan lagi potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan melakukan restocking di reservat/suaka dan lubuk larangan.

➤ **Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khususnya kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi. Selain itu, permasalahan masih tingginya harga pakan dan biaya operasional untuk budidaya menjadi kendala bagi pembudidaya untuk meningkatkan hasil produksi. Solusinya yakni dengan meningkatkan GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri)

➤ **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah belum selesainya Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut yang dibagi menjadi zonasi-zonasi yang sesuai dengan pemanfaatannya seperti zona penangkapan, zona pelabuhan, jalur perhubungan, zona pertambangan, zona konservasi dan zona lainnya perlu diatur dalam sebuah peraturan yang menjadi dasar untuk pemanfaatan laut untuk keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan mempercepat pembuatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K) sehingga pemanfaatan ruang laut dapat dikelola dengan baik agar berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa merusak sumber daya alam.

➤ **Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu masih banyak UMKM pengolah produk perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) sehingga daya saing produk olahan hasil perikanan dari UMKM kalah bersaing dengan produk olahan ikan lainnya. Solusinya yaitu dengan memberikan edukasi melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi mengenai peningkatan mutu produk olahan hasil perikanan dan mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP).

Tabel 22. Alokasi dan Realisasi Anggaran bersumber APBN Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi		
			Rp. (000)	Keuangan (%)	Fisik (%)
I.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	600.000	598.502,4	99,75	100
1.	Pengelolaan Keuangan KKP	138.712	138.311,3	99,71	100
2.	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP	415.696	414.612,4	99,74	100
3.	Pengembangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan	45.592	45.578,6	99,97	100
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	356.684	296.278,5	83,06	94,27
1.	<i>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</i>	57.816	40.781	70,54	78,41
2.	Pengendalian Penangkapan Ikan	102.060	90.287,6	88,47	92,88
3.	Pengelolaan sumber daya ikan	108.573	82.776,2	76,24	82,33
4.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.235	88.235	93,43	96,01
III.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	401.122	392.868	97,94	100
1.	Pengelolaan perbenihan ikan	20.000	19.881	99,41	100

2.	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya	39.400	37.446,9	95,04	100
3.	Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan	22.500	21.972,6	97,66	100
4.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	319.222	313.567,7	98,23	100
IV.	Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	482.158	467.002	96,86	100
1.	Pemantauan dan operasi armada	388.594	387.576,5	99,74	100
2.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen PSDKP	93.564	79.425,5	84,89	100
V	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	254.550	254.550	98,39	100
1.	Logistik hasil kelautan dan perikanan	77.450	74.614	96,34	96,34
2.	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan	47.100	46.580,7	98,90	98,90
3.	Pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan	55.000	54.996	99,99	99,99
4.	Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan	40.000	39.410,6	98,53	98,53
5.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPKP	35.000	34.860	99,60	99,60

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam penyerapan dana dekonsentrasi tahun 2018. Program pengelolaan perikanan tangkap menjadi satunya program yang penyerapan dibawah 90%. Hal ini disebabkan sub kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pertemuan ditingkat pusat tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada undangan pertemuan dari pusat untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Solusinya dengan mengembalikan anggaran yang tidak terserap ke kas negara.

IV. PENUTUP

Sebagai manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur No. 1 tahun 2000, Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2018.

Capaian sementara kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2018 antara lain :

- a. Jumlah reservat dari target sebanyak 24 lokasi terealisasi sebanyak 23 lokasi atau sebesar 95,8 %.
- b. Jumlah benih ikan lokal yang ditebar diperairan target sebanyak 270.000 ekor terealisasi sebanyak 220.000 ekor atau 81,5 %.
- c. Jumlah rekomendasi dokumen perizinan target sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 50 %
- d. Jumlah Produksi perikanan target sebesar 123.684 ton terealisasi sebesar 102.968,5 ton atau sebesar 83,3 %
- e. Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi dengan target sebanyak 62 kelompok dengan realisasi 71 kelompok atau sebesar 115 %.
- f. Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih dengan target sebanyak 100 orang, realisasi sebanyak 100 orang atau sebesar 100 %
- g. NTN dengan target 110,32 realisasi sebesar 113,37 atau 102,8 %
- h. NTPi dengan target 100 realisasi sebesar 96,13 atau 96,13 %

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi telah cukup berhasil bukan berarti tidak ada permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar adalah masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumberdaya manusia. khususnya yang berpendidikan teknis kelautan dan perikanan yang ada di UPT /Instansi serta di lapangan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dalam bidang pembinaan dan

penyuluhan perikanan. Guna mengantisipasi permasalahan yang ada perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, juga dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, serta instansi pemerintah lainnya maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
- c. Memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas, serta memberikan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan.
- d. Diperlukan rekrutmen tenaga teknis baru yang berpendidikan teknis perikanan. Selain itu telah diupayakan untuk memberikan kesempatan berlatih dan magang kepada aparat yang ada.

Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan laporan LAKIP yang ke-17 (tujuh belas). Namun demikian LKJ ini masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan dimasa mendatang.

LAMPIRAN

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Tujuan (*)	Sasaran (**)	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan (output))	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun Pemandang		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya ASN DKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Karyawan karyawan yang terampil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	1,682,415,060	100	1,535,000,000	100	1,761,100,000	100	1,993,000,000	100	2,223,000,000	100	2,440,000,000	100	11,634,515,060	DKP	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	12 bulan	12 bulan	46,680,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,500,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	16,000,000	12 bulan	111,180,000	DKP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	12 bulan	12 bulan	497,922,400	12 bulan	520,000,000	12 bulan	596,600,000	12 bulan	673,000,000	12 bulan	750,000,000	12 bulan	827,000,000	12 bulan	3,864,522,400	DKP	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (orang)	20 Orang	20 Orang	378,761,160	22 Orang	410,000,000	24 orang	470,000,000	35 orang	531,000,000	35 orang	600,000,000	35 orang	652,000,000	35 orang	3,041,761,160	DKP	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	39,000,000	12 bulan	44,000,000	12 bulan	48,000,000	12 bulan	256,000,000	DKP	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	40 paket	40 paket	145,133,500	40 paket	90,000,000	44 paket	104,000,000	46 paket	120,000,000	49 paket	130,000,000	55 paket	143,000,000	55 paket	732,133,500	DKP	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 paket	12 paket	55,392,500	12 paket	40,000,000	12 paket	46,000,000	14 paket	52,000,000	14 paket	57,000,000	16 paket	63,000,000	16 paket	313,392,500	DKP	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 paket	10 paket	13,400,500	10 paket	10,000,000	10 paket	12,000,000	10 paket	13,000,000	10 paket	14,000,000	10 paket	16,000,000	10 paket	78,400,500	DKP	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Paket	2 Kali	25,125,000	2 Paket	15,000,000	2 Kali	17,000,000	2 Kali	20,000,000	2 Kali	22,000,000	2 Kali	24,000,000	2 Kali	123,125,000	DKP	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	pelayanan makan dan minum (bulan)	12 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	69,000,000	12 bulan	78,000,000	12 bulan	87,000,000	12 bulan	95,000,000	12 bulan	449,000,000	DKP	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	12 bulan	400,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	454,000,000	12 bulan	505,000,000	12 bulan	556,000,000	12 bulan	2,665,000,000	DKP	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	1,593,232,100	100%	1,570,000,000	100%	1,801,000,000	100%	1,887,124,000	100%	2,039,399,000	100%	2,239,202,000	100%	11,129,957,100	DKP	
				Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	4 unit	-	4 unit	-	12 unit	-	DKP	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 buah	6 buah	88,620,000	-	-	-	-	8 buah	-	9 buah	-	10 buah	-	35 buah	88,620,000	DKP	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	-	-	-	6 paket	150,000,000	8 paket	172,000,000	9 paket	175,000,000	10 paket	180,000,000	11 paket	180,000,000	44 paket	857,000,000	DKP	
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	3 unit	-	DKP	
				Pengadaan meubelur	Jumlah pengadaan meubelur	8 paket	8 paket	161,508,000	6 paket	200,000,000	8 paket	230,000,000	5 paket	80,000,000	6 paket	100,000,000	7 paket	120,000,000	50 paket	891,508,000	DKP	
				Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer, Laptop, Printer, UPS, Gigastore	5 unit	5 unit	165,619,000	5 unit	120,000,000	5 unit	137,000,000	16 unit	155,370,000	15 unit	173,055,000	15 unit	190,741,000	61 unit	941,785,000	DKP	
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	-	-	-	-	-	12 bulan	-	DKP									
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	115,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	115,000,000	12 bulan	129,475,000	12 bulan	144,213,000	12 bulan	158,951,000	12 bulan	762,639,000	DKP	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	615,145,100	12 bulan	600,000,000	12 bulan	688,000,000	12 bulan	778,853,000	12 bulan	865,279,000	12 bulan	953,706,000	12 bulan	4,500,983,100	DKP	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	DKP							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 paket	9 paket	97.900.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	129.475.000	12 bulan	144.213.000	12 bulan	158.951.000	12 bulan	745.539.000	DKP	
				Rohabiltasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab sedang/ berat	-	-	-	1 paket	100.000.000	2 unit	115.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	144.213.000	2 unit	158.951.000	8 unit	698.164.000	DKP	
				Rohabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	6 unit	6 paket	349.440.000	2 paket	200.000.000	8 paket	229.000.000	5 paket	258.951.000	7 paket	288.426.000	10 paket	317.902.000	38 paket	1.643.719.000	DKP	
				Rohabiltasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang direhab sedang/ berat	-	-	-	0	-	2 unit	-	6 unit	-	DKP							
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PMS yang disiplin (%)	100%	100%	140.000.000	100%	210.000.000	100%	240.000.000	100%	271.000.000	100%	302.000.000	100%	350.000.000	100%	1.513.000.000	DKP	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	350 stel	350 stel	140.000.000	350 stel	210.000.000	350 stel	240.000.000	350 stel	271.000.000	350 stel	302.000.000	350 stel	350.000.000	350 stel	1.513.000.000	DKP	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur berkompentensi (%)	100%	100%	263.140.000	100%	420.000.000	100%	470.528.000	100%	521.056.000	100%	571.585.000	100%	622.113.000	100%	2.848.422.000	DKP	
				Penerimaan calon taruna STP	Jumlah taruna STP yang diterima	-	-	-	0	-	24 orang	-	26 orang	-	28 orang	-	30 orang	-	130 orang	-	DKP	
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	150.000.000	60 orang	75.000.000	30 orang	155.000.000	40 orang	165.000.000	50 orang	175.000.000	60 orang	185.000.000	290 orang	905.000.000	DKP	
				Kegiatan penatausahaan kepegawain	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawain (kali)	1 kali	1 kali	113.140.000	1 kali	125.000.000	1 kali	143.422.000	1 kali	161.844.000	1 kali	180.266.000	1 kali	198.688.000	1 kali	922.360.000	DKP	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	2 kali	80.000.000	2 kali	91.790.000	2 kali	103.580.000	2 kali	115.370.000	2 kali	127.160.000	2 kali	517.900.000	DKP	
				Kegiatan penatausahaan kearsipan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kearsipan (kali)	-	-	-	1 paket	70.000.000	2 kali	80.316.000	2 kali	90.632.000	2 kali	100.949.000	2 kali	111.265.000	2 kali	453.162.000	DKP	
				Kegiatan Pendampingan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kegiatan Pendampingan	-	-	-	48 kali	70.000.000	2 kali	-	2 kali	70.000.000	DKP							
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	98%	98%	1.756.321.240	98%	1.340.883.000	98%	1.559.022.000	99%	1.802.163.000	99%	1.985.303.000	100%	2.163.444.000	100%	10.607.136.240	DKP	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan	284.134.000	9 laporan	200.000.000	9 laporan	250.000.000	9 laporan	325.000.000	9 laporan	340.000.000	9 laporan	350.000.000	9 laporan	1.749.134.000	DKP	
				Kegiatan Koordinasi pengumpulan, pengalihan dan analisa data statistik	Jumlah laporan Data statistik perikanan yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	818.544.000	12 Laporan	390.883.000	12 Laporan	448.490.000	12 Laporan	506.097.000	12 Laporan	563.705.000	12 Laporan	621.312.000	12 Laporan	3.349.031.000	DKP	
				Rancangan penyusunan program, anggaran dan sinkronisasi program kegiatan SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	295.672.240	5 dokumen	400.000.000	5 dokumen	458.951.000	5 dokumen	517.902.000	5 dokumen	576.853.000	5 dokumen	635.804.000	5 dokumen	2.885.182.240	DKP	
				Sinkronisasi program kegiatan SKPD	Jumlah rapat sinkronisasi program yang terlaksana	2 kali	2 kali	243.074.000	0	-	2 kali	243.074.000	DKP									
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah laporan movev pelaksanaan program kegiatan	-	-	-	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	229.475.000	12 Laporan	258.951.000	12 Laporan	288.426.000	12 Laporan	317.902.000	12 Laporan	1.294.754.000	DKP	
				Kegiatan Inventarisasi dan Penertiban Aset	Jumlah Dokumen aset yang di inventaris	2 dokumen	2 dokumen	114.897.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	172.106.000	3 dokumen	194.213.000	3 dokumen	216.319.000	3 dokumen	238.426.000	3 dokumen	1.085.961.000	DKP	
1) Meningkatkan	1. Meningkatkan Pengelolaan dan pemulihan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pemulihan kawasan mangrove		PROGRAM PENGAWASAN SDKP, KONSERVASI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi (%)	22 Lokasi	0	3.181.827.200	5	4.169.265.920	4%	4.073.188.000	4%	4.744.246.000	4%	5.210.040.000	4%	5.715.872.000	(23%) 27 Lokasi	27.094.459.120	DKP	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir	2. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan kasus pelanggaran		Kegiatan Perlindungan dan Konservasi/Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Reservat meningkat	22 Lokasi	22 Lokasi	1.058.194,000	23 Lokasi	1.000.000,000	24 Lokasi	1.147.377,000	25 Lokasi		26 Lokasi		27 Lokasi		27 Lokasi	3.205.571,000	DKP		
	3. Meningkatnya peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase penurunan desa tertinggal di kawasan pesisir		Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah Desa pesisir yang mendapat pelatihan	5 desa	5 desa	1.152.000,000	5 desa	1.000.000,000	5 desa	1.147.377,000	5 desa		5 desa		5 desa		5 desa	3.299.377,000	DKP		
	4. Meningkatnya pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan	Perda Rencana Zonasi Pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil		Kegiatan Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	36 kali	36 kali	971.633,200	36 kali	1.050.000,000	36 kali	1.204.746,000	34 kali	1.259.492,000	36 kali	1.314.239,000	36 kali	1.368.985,000	36 kali	1.716.095,200	DKP		
2) Meningkatkan pengelolaan ruang laut				Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah dokumen Zonasi	-	-	-	1 dokumen	500.000,000	1 dokumen	573.688,000	1 dokumen	647.377,000	1 dokumen	721.066,000	1 dokumen	794.755,000	1 dokumen	3.236.886,000	DKP		
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Reservat meningkat	22 Lokasi						25 lokasi	1.147.377,000	26 lokasi	1.294.755,000	27 lokasi	1.442.132,000	27 lokasi	3.884.264,000	DKP			
				Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir Yang Terbina							80 Orang	400.000,000	100 Orang	450.000,000	100 Orang	500.000,000	300 orang	1.350.000,000	DKP			
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Pendung Semurup Kerinci	Jumlah benih ikan lokal (ekor)			200.000 ekor	457.777,400			250.000 ekor	710.000,000	375.000 ekor	780.000,000	505.000 ekor	860.000,000	1.130.000 ekor	2.807.777,400	DKP			
			Kegiatan Pengelolaan Instalasi Thehok	Jumlah benih ikan lokal (ekor)			400.000 ekor	161.488,520			475.000 ekor	580.000,000	650.000 ekor	650.000,000	850.000 ekor	750.000,000	1.975.000 ekor	2.141.488,520	DKP				
1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan	Meningkatnya NPTI		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/ha/Th)	21,1 ton/ha/Th	24,2 ton/ha/Th	10,459,463,800	24,8 ton/ha/Th	12,030,000,000	25,3 ton/ha/Th	5,736,881,000	25,9 ton/ha/Th	2,104,985,000	26,5 ton/ha/Th	2,424,985,000	27,1 ton/ha/Th	2,744,985,000	27,1 ton/ha/Th	35,501,299,800	DKP		
	2. Meningkatnya usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya			Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan di Sentra Produksi	Jumlah produksi perikanan budidaya di sentra produksi	30.084 Ton	34.484 ton	2.239,062,000	57.240 ton	8,130,000,000	60.674 ton	1.262,115,000	64.315 ton	-	68.174 ton	-	72.264 ton	-	72.264 ton	11.631,177,000	DKP		
				Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya	Jumlah Pokdakan,UPR dan petugas BBI yang andal	900 Orang	900 Orang	125.744,000	900 Orang	141.000,000	900 Orang	161.780,000	920 Orang	-	920 Orang	-	920 Orang	-	920 Orang	428.524,000	DKP		
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya	130 paket	130 paket	441.692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 paket	441.692,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Perbenihan Ikan komersil dan Ikan lokal Jambi di UPTD BBID	Jumlah produksi benih ikan di BBID	2.500.000 ekor	2.500.000 ekor	1.957.695,800	1.600.000 ekor	675.000,000	1.600.000 ekor	774.479,000	1.600.000 ekor	-	1.600.000 ekor	-	1.600.000 ekor	-	1.600.000 ekor	3.407.174,800	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Ikan Hias di UPTD BBID	Jumlah produksi benih ikan Hias	100.000 ekor	100.000 ekor	649.278,000	100.000 ekor	300.000,000	120.000 ekor	344.213,000	-	-	-	-	-	-	-	120.000 ekor	1.293.491,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Induk dan Benih UPTD BBIS Kerinci	Jumlah Produksi Induk dan benih ikan di BBIS kerinci	4.200 induk	4.200 induk	727.053,000	5.000 induk	1.100.000,000	5.000 induk	1.262,115,000	5.000 induk	-	5.000 induk	-	5.000 induk	-	5.000 induk	3.089,168,000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Induk dan Benih UPTD BBIS Kerinci	Jumlah Produksi benih ikan di BBIS kerinci	5.500.000 benih	5.500.000 benih	1.696.457,000	3.000.000 benih	3.000.000 benih	3.000.000 benih	-	3.000.000 benih	1.696.457,000	DKP								
				Kegiatan Pengembangan Ikan Semah	Jumlah Induk ikan semah	1.544 induk	1.560 induk	253.758,000	1.580 induk	375.000,000	1.600 induk	430.266,000	1.620 induk	-	1.640 induk	-	1.660 induk	-	1.660 induk	1.059,024,000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau	Jumlah produksi Air Payau	642 ton	736 ton	200.160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.160,000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Minapoltan	Jumlah produksi di kawasan minapoltan	14.672 ton	16.818 ton	567.676,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567.676,000	DKP	
		Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Pembudidaya Wanita dan Pemuda Kreatif	Jumlah Kelompok Pembudidaya Wanita dan Pemuda Kreatif	1.712 ton	1.962 ton	444.020,000	20 kelompok	112.000,000	20 kelompok	128.506,000	20 kelompok	-	20 kelompok	-	20 kelompok	-	20 kelompok	684.526,000	DKP				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Perikanan budidaya di pondok pesantren, Lembaga Pemasaryakan, Sekolah dan TNI/Polri	Jumlah lokasi pondok pesantren, LP, sekolah dan TNI/Polri yang dibina				4 Lembaga	112.000.000	4 Lembaga	128.506.000	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga	240.506.000	DKP	
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya di Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah perikanan di kawasan mandiri pangan				11 kawasan	150.000.000	11 kawasan	172.106.000	11 kawasan		11 kawasan		11 kawasan		11 kawasan	322.106.000	DKP	
				Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	50 sampel	50 sampel	564.766.000	50 Sampel	225.000.000	50 Sampel	258.159.000	50 Sampel	625.000.000	50 Sampel	745.000.000	50 Sampel	865.000.000	50 Sampel	3.282.925.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Jumlah kawasan yang dibangun				5 kawasan	150.000.000	5 kawasan	172.106.000	5 kawasan		5 kawasan		5 kawasan		5 kawasan	322.106.000	DKP	
				Pengembangan dan Penguatan Modal usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok yang mendapat pinjaman				6 kelompok	110.000.000	6 kelompok	126.211.000	6 kelompok		6 kelompok		6 kelompok		6 kelompok	236.211.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Mutu Pakan	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar				10 jenis	300.000.000	10 jenis	344.213.000	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis	644.213.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Jumlah BIMTEK Perikanan Budidaya				2 paket	150.000.000	2 paket	172.106.000	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	322.106.000	DKP	
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi								285	752.050.000	335	852.050.000	385	952.050.000	1005	2.556.150.000		
				Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Mutu Pakan Perikanan Budidaya	Jenis pakan yang beredar sesuai standar (jenis)								6	727.935.000	8	827.935.000	10	927.935.000	24	2.483.805.000		
1) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Meningkatkan pendapatan nelayan	Meningkatnya NTN		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produktivitas perikanan tangkap (Ton/lat tangkap/thn)	13,0 ton/lat tangkap/thn	13,9 ton/lat tangkap/thn	5.497,178.500	14,2 ton/lat tangkap/thn	4.230.000.000	14,6 ton/lat tangkap/thn	4.853.403.000	14,9 ton/lat tangkap/thn	4.337.888.500	15,2 ton/lat tangkap/thn	4.895.535.000	15,7 ton/lat tangkap/thn	5.423.080.500	15,7 ton/lat tangkap/thn	23.445.366.500	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aktifitas LIPTD Pelabuhan Perikanan Pantai	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana di PPP Kuala Tunggal	70 %	70 %	2.265.423.300	75 %	1.000.000.000	80 %	1.147.377.000	85 %		90%		95 %		95 %	4.412.800.300	DKP	
	2. Meningkatkan usaha perikanan tangkap dan perikanan			Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah Alat Tangkap	2.494 unit	3.600 Unit	2.304.341.200	4.000 unit	1.350.000.000	4.300 unit	1.548.959.000	4.400 unit	1.747.919.000	4.500 unit	1.946.879.000	4.600 unit	2.145.838.000	4.600 unit	11.043.936.200	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Produksi	51.109 ton	58.690 ton	279.207.000	60.979 ton	427.000.000	63.010 ton	489.930.000	65.108 ton	552.860.000	67.276 ton	615.790.000	70.000 ton	678.720.000	70.000 ton	3.043.507.000	DKP	
				Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Jumlah Pemacuan stock Ikan Perairan Umum	200.000 ekor	300.000 ekor	518.897.000	300.000 ekor	654.000.000	500.000 ekor	750.384.000	600.000 ekor		700.000 ekor		800.000 ekor		800.000 ekor	1.923.281.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan minapoltan tangkap	Jumlah nelayan yang dibina	35 orang	40 Orang	129.310.000												129.310.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan kawasan perikanan tangkap	Jumlah kawasan yang terbina				3 kawasan	200.000.000	50 Orang	229.475.000	55 Orang		60 Orang		65 Orang		65 Orang	429.475.000	DKP	
				Kegiatan kesyahbandaran dan pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Ikan				3 pelabuhan	327.000.000	3 pelabuhan	375.192.000	3 pelabuhan		3 pelabuhan		3 pelabuhan		3 pelabuhan	702.192.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah Bimtek Perikanan Tangkap				4 Kali	272.000.000	4 Kali	312.086.000	4 Kali	352.173.000	4 Kali	392.260.000	4 Kali	432.346.000	4 Kali	1.760.865.000	DKP	
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tunggal	Persentase Peningkatan Kapal Yang Mondarat di PPP Kuala Tunggal	30%							35%	1.147.377.000	40%	1.294.755.000	45%	1.442.132.000	45%			
				Kegiatan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tunggal	Persentase Peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran	10%							20%	375.192.000	30%	423.384.000	40%	471.577.000	40%			
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase Peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	15%							15%	162.367.500	20%	222.467.000	30%	252.467.500	30%			
1) Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan per kapita	1. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan UIMKM dan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Per Kapita		PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita (Kg/Kapita/Thn)	34,00 Kg/Kapita/Thn	35,00 kg/kapita/Thn	2.632.768.000	35,40 kg/kapita/Thn	2.500.000.000	36,00 kg/kapita/Thn	3.499.999.200	37,00 kg/kapita/Thn	4.566.428.300	38,00 kg/kapita/Thn	5.080.977.300	39,00 kg/kapita/Thn	5.645.527.300	39,00 kg/kapita/Thn	23.925.700.100	DKP	
				Kegiatan Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan	Jumlah Promosi dan Publikasi Kegiatan Perikanan	25 kali	31 Kali	736.808.000	31 Kali	730.000.000	35 kali	837.585.000	38 kali		40 kali		42 kali		42 Kali	2.304.393.000	DKP	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Industri			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah fasilitas sarana informasi pasar	1 paket	1 paket	198.458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.458.000	DKP		
				Kegiatan Pemasaran	Jumlah suplier	40 orang	40 orang	85.053.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.053.000	DKP	
					Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah dokumen Informasi pemasaran	-	-	-	1 dokumen	261.000.000	1 dokumen	299.465.000	1 dokumen	337.931.000	1 dokumen	376.396.000	1 dokumen	414.862.000	1 dokumen	1.689.654.000	DKP	
					Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	4.050 ton	4.120 ton	760.416.000	4.200 ton	728.000.000	4.400 ton	835.290.000	4.600 ton	942.581.000	4.800 ton	1.049.872.000	5.000 ton	1.157.163.000	5.000 ton	5.473.322.000		
				Kegiatan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	Jumlah pengujian Mutu Hasil Perikanan (kali)	-	-	-	7 kali	156.000.000	7 kali	178.990.000	7 kali	-	7 kali	-	7 kali	-	7 kali	334.990.000	DKP		
				Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Terbitnya dokumen SKP	2 dokumen	2 dokumen	383.415.000	2 dokumen	365.000.000	4 dokumen	418.792.000	5 dokumen	-	6 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	1.167.207.000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah UMKM yg bankable	5 UMKM	5 UMKM	468.618.000	5 UMKM	260.000.000	5 UMKM	298.318.000	5 UMKM	-	5 UMKM	-	5 UMKM	-	5 UMKM	1.026.936.000	DKP		
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Taman Angrek	Jumlah Benih Ikan Hias	-	-	-	-	-	120.000 ekor	168.769.200	-	-	-	-	-	-	-	120.000 ekor	168.769.200	DKP	
				Kegiatan Promosi dan Publikasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Promosi dan Publikasi Kegiatan Perikanan	25 kali	-	-	-	-	-	-	28 kali	1.343.058.500	30 kali	1.443.058.500	32 kali	1.543.058.500	32 kali	4.329.175.500	DKP		
				Pengembangan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)	Jumlah sarana dan prasarana UPTD PMHP	-	-	-	-	-	4 paket	462.790.000	-	-	-	-	-	-	-	4 paket	462.790.000		
				Kegiatan Pelayanan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah Pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	20 sampel	361.626.700	40 sampel	411.626.700	60 sampel	461.626.700	60 sampel	1.234.880.100	DKP		
				Kegiatan Pengelolaan Instalasi Ikan Hias Telanaipura	Jumlah Benih Ikan Hias	-	-	-	-	-	-	-	100.000 ekor	721.122.100	130.000 ekor	761.122.100	100.000 ekor	831.122.100	330.000 ekor	2.313.366.300	DKP		
				Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan di UPTD PMHP	Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	5 kali	250.306.000	10 kali	325.306.000	20 kali	390.306.000	20 kali	965.918.000	DKP		
				Kegiatan Pembinaan Mutu	Jumlah Dokumen SKP	-	-	-	-	-	-	-	23 dokumen	472.585.000	25 dokumen	526.378.000	26 dokumen	580.171.000	74 dokumen	1.579.134.000	DKP		
				Kegiatan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Ragam Produk	-	-	-	-	-	-	-	36 ragam	137.218.000	38 ragam	187.218.000	40 ragam	267.218.000	40 ragam	591.654.000	DKP		
					JUMLAH TOTAL			27.206.345.900		28.005.148.920		23.995.121.200		22.227.890.800		24.732.844.300		27.344.223.800		147.719.855.920			



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEMAWISMAN, S.Pi
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum
Jabatan : PLT. GUBERNUR JAMBI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Mei 2018

Pihak Kedua,
PLT. GUBERNUR JAMBI,

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI,



TEMAWISMAN, S.Pi
PEMBINA TK I / IV B
NIP. 19681021 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
 TAHUN ANGGARAN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kawasan yang terlindungi	Jumlah reservat	24 Lokasi
Meningkatnya Populasi ikan lokal Jambi	Jumlah benih ikan lokal yang ditebar di perairan umum	270.000 Ekor
Meningkatnya pemanfaatan ruang laut sesuai peraturan perundangan	Jumlah rekomendasi dokumen Perizinan	2 Dokumen
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	123.684 Ton
Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha perikanan	Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi	62 Kelompok
Memperluas akses lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat yang dilatih	100 Orang
Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	NTN	110,32
	NTPi	100,00
Meningkatnya mutu produk hasil perikanan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	20 SKP
Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	Angka konsumsi ikan per kapita (Kg/kapita/tahun)	36,00 Kg/kapita/thn
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan	70%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	1.535.204.800	APBD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	1.105.800.000	APBD
3. Program peningkatan disiplin aparatur	195.000.000	APBD
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	386.568.000	APBD
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1.245.579.300	APBD
6. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	5.493.908.600	APBD dan DAK

PROGRAM	ANGGARAN	KET
7. Program pengembangan budidaya perikanan	5.649.131.200	APBD dan DAK
8. Program pengembangan perikanan tangkap	4.483.392.100	APBD dan DAK
9. Program pengembangan pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	2.351.335.000	APBD

Pihak Kedua,
PLT. GUBERNUR JAMBI,



DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI,



TEMAWISMAN, S.Pi
PEMBINA TK I / IV B
NIP. 19681021 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TEMAWISMAN, S.Pi**
Jabatan : **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**
Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAMBI,

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI,**



TEMAWISMAN, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
NIP. 19681021 199903 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
 TAHUN ANGGARAN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Pengelolaan dan pemulihan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	4%
Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6%
	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,3%
Meningkatnya Konsumsi Ikan masyarakat	Presentase Peningkatan Konsumsi Ikan Perkapita	2,8%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
	Nilai SAKIP	62
	Opini Laporan Keuangan/ Presentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan	B

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	1,540,470,300	APBD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,332,700,000	APBD
3. Program peningkatan disiplin aparatur	175,000,000	APBD
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	372,971,200	APBD
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,339,015,640	APBD
6. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	4,302,564,600	APBD dan DAK

PROGRAM	ANGGARAN	KET
7. Program pengembangan perikanan budidaya	1,522,610,000	APBD
8. Program pengembangan perikanan tangkap	3,737,735,300	APBD dan DAK
9. Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	4,236,877,300	APBD dan DAK

GUBERNUR JAMBI,



DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jambi, Maret 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI,



TEMAWISMAN, S.Pi
 PEMBINA UTAMA MUDA / IV C
 NIP. 19681021 199903 1 002



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

Jl. MT. Haryono No.09 Telanaipura-Jambi